

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara struktur Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali hanya ada dua pejabat struktural, yakni jabatan Kepala Balai dan jabatan Kasubag Tata Usaha sesuai Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012. Sedangkan pekerjaan teknis ditangani oleh Kelompok Jabatan Fungsional dengan seorang koordinator.

Upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, Kepala Balai membentuk lima kelompok tenaga teknis yang sesuai dengan bidang/aspek garapannya, yakni aspek Sejarah, aspek Tradisi, aspek Kepercayaan, aspek Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya (INDB), dan aspek Seni dan Film.

Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok, yang tugasnya membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Dengan kegiatan penelitian, ceramah, diskusi, seminar, sarasehan, lomba karya tulis, sayembara, dan festival. Sedangkan untuk mempublikasikan semua dari hasil kegiatan yang diprogramkan Balai, Kepala Balai telah pula menunjuk Ketua kelompok dokumentasi dan informasi, serta perpustakaan. Akan tetapi, untuk melancarkan semua kegiatan teknis, Kepala Balai juga membentuk kelompok-kelompok dibidang administrasi seperti kelompok Urusan Dalam, Kelompok Keuangan dan Kelompok Kepegawaian. Dari masing-masing kelompok itu juga dipimpin oleh seorang Ketua kelompok dan semua Ketua kelompok yang ada dibidang administrasi dikoordinir oleh Kasubag Tata Usaha. Para Ketua Kelompok diangkat berdasarkan SK dari Kepala Balai dan SK pengangkatan berlaku satu tahun anggaran.

Lebih lanjut kiranya perlu juga diuraikan perkembangan dan perubahan struktur Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan, yang dahulu di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan sejak tanggal 5 Desember 2003 di bawah Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional dipimpin seorang kepala. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang membawahi ASDEP Urusan Tradisi, Asdep Urusan Kepercayaan, ASDEP Urusan Sejarah Nasional,

ASDEP Urusan Hubungan Antar Budaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP-2005, Tanggal 27 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, dan NTT berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (Direktorat Tradisi dan Direktorat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (Direktorat Nilai Sejarah dan Direktorat Geografi Sejarah).

Selanjutnya, Struktur Organisasi PBSNT Bali, NTB, NTT sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.38/OT.001/MKP-2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai berikut:

- a. Kepala Balai
- b. Sub. Bagian Tata Usaha membawahi: (1) Urusan Dalam; (2) Urusan Kepegawaian; (3) Urusan Keuangan; dan (4) Urusan Informasi, Publikasi dan Perpustakaan.
- c. Kelompok Fungsional dengan klasifikasi: (1) Kelompok Sejarah; (2) Kelompok Tradisi; (3) Kelompok Pembangunan Karakter Pakerti Bangsa (PKPB); (4) Kelompok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan (5) Kelompok Seni dan Film.

Perkembangan selanjutnya, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali (**Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali**) pada tahun akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 terjadi perpindahan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**) ke Kementerian Pendidikan Nasional (**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**) masih menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Nilai Budaya, seni dan Film, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Awalnya Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional tertuang dalam Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0303/1995, tanggal 4 Oktober 1995 tentang Pendirian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM 38/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional berubah nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Demikian pula bergabung dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya dengan Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 53 tahun 2012, di bawah Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan drngan tugas dan fungsi yang tetap, yaitu Kajian/Penelitian dan Sosialisasi dan Internalisasi/Non Penelitian. Namun, ada perubahan alamat kantor, yaitu dengan alamat di Kabupaten Badung.

## B. Gambaran Kemdikbud

Sejarah tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:  
Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggelora ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

### Era Demokrasi Liberal (1951-1959)

Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.

Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya

payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.

#### Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.

Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurus pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

#### Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.

Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar

#### Era Reformasi (1998-2011)

Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan

mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.

Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.

Kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sesuai dengan tupoksi dari penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010-2014, dengan mengacu renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014. Renstra BPNB Bali 2010 -2014 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*rolling plan*) dalam kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 - 2014 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014.

Oleh karena itu, Renstra Kemdikbud 2010 -2014 merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemdikbud. Dokumen Renstra Kemdikbud ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan Renstra Satuan Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kemendikbud. Renstra Kemendikbud ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). Kedua rencana tersebut menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

### C. Peran dan Fungsi

Peraturan Pendukung:

- a. Kep. Mendikbud No.: 0303/O/1995, tanggal 4 Oktober tentang Pendirian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- b. Kep. Menbudpar No.: KM52/OT/MKP/2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor IV/1999 tentang GBHN (kebijakan pembangunan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata)
- d. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Propenas
- e. Keputusan Kepala LAN, Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005.
- g. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.38/OT.001/MKP-2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- h. Kepmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- i. DIPA Nomor: 0020/040-03.2/20/2012, tanggal 9 Desember 2011 dan Petunjuk Pelaksanaan DIPA Tahun 2012.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali secara garis besar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

**Tugas:**

*Melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pendokumentasian aspek- aspek budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film.*

**Fungsi:**

- a. *Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek nilai budaya, seni dan film serta kesejarahan.*
- b. *Pengembangan hasil kajian*
- c. *Pelaksanaan pengemasan hasil kajian dan pemanfaatannya*
- d. *Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi*
- e. *Pelaksanaan perlindungan*
- f. *Pelaksanaan pelayanan.*

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan secara nasional, maka maka titik berat kegiatan dapat disesuaikan dengan tujuan sasaran pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan bidang nilai budaya (sejarah dan nilai tradisional) yang diemban PBNB Bali mengacu kepada rumusan tujuan dan sasaran pembangunan kebudayaan nasional jangka panjang adalah terciptanya:

1. Bangsa yang mengenal dan menghargai serta mencintai tanah air agar adat-istiadat dan budaya Indonesia dengan kebhinekaannya tetap terpelihara
2. Kelestarian sistem budaya Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional dan diperkaya oleh budaya baru yang serasi dan kondusif untuk menghadapi tantangan masa depan
3. Kebudayaan bangsa Indonesia yang maju, beradab dan memperkokoh persatuan bangsa, terbuka terhadap elemen baru kebudayaan luar yang dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan nasional serta mengangkat derajat dan harkat kemanusiaan bangsa Indonesia
4. Kelestarian kebudayaan daerah yang beraneka ragam dalam bingkai kebudayaan nasional Indonesia sebagai kekayaan dan modal dalam pembangunan nasional
5. Saling memahami dan penghargaan masyarakat terhadap budaya masyarakat lainnya

Untuk mendukung rumusan tujuan dan sasaran tersebut di atas maka, PBNB Bali merumuskan tujuan dan sasaran jangka panjang sebagai berikut:

1. meningkatkan penguasaan materi berdasarkan spesialisasi di bidang sejarah bagi kelompok sejarah, bidang nilai tradisional bagi kelompok tradisi, bidang internalisasi budaya bagi kelompok internalisasi nilai dan diplomasi budaya, bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi kelompok kepercayaan
2. meningkatkan kemampuan tenaga fungsional peneliti dalam menerapkan teknik dan metode penelitian serta ketajaman analisis
3. meningkatkan kualitas penulisan hasil penelitian
4. meningkatkan internasliasi dan sosialisasi
5. meningkatkan pendokumentasian dan sosialisasi

#### Sasaran

1. peningkatan pelestarian nilai budaya bangsa melalui upaya pengungkapan pengkajian dan penanaman nilai-nilai tradisi, adat-istiadat dan kepercayaan terhadap Tuhan YME yang berkembang pada 58 suku bangsa di tiga wilayah (Provinsi Bali, NTB dan NTT), sehingga dapat menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, terutama pada generasi muda melalui jalur pendidikan dalam keluarga, masyarakat, pendidikan sekolah dan media massa.



2. peningkatan kebanggaan dan penghargaan terhadap kebudayaan bangsa sendiri, sehingga dapat membentuk karakter dan memperkuat kesadaran jati diri bangsa.

Kondisi geografis wilayah Bali, NTB dan NTT (dahulu Sunda Kecil) cukup beragam, baik ditinjau dari alamnya, agama yang dianut oleh penduduknya, dan kebudayaan yang didukung oleh kurang lebih 58 suku bangsa. Ditinjau dari geografis wilayah Sunda Kecil ini terdiri dari daerah kepulauan, baik pulau-pulau yang besar maupun kecil. Nusa Tenggara Timur memiliki 3 (tiga) pulau besar (Flores, Timor dan Sumba) serta pulau-pulau kecil lainnya; Nusa Tenggara Barat memiliki dua buah pulau besar (Lombok dan Sumbawa) serta pulau-pulau kecil lainnya sedangkan Bali memiliki satu pulau besar (Bali) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (*sustainable*) dan memiliki dukungan secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis. Sebagai strategi untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan program-program utama yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Sasaran strategis, indikator, dan program Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dalam kurun waktu tahun 2010–2014.